

ABSTRAK

STRATEGI INTERNASIONALISASI DALAM UPAYA DEKOLONISASI KALEDONIA BARU OLEH KELOMPOK PRO-KEMERDEKAAN

Oleh

UMMI NIDA AFIFA

Kaledonia Baru merupakan wilayah dengan status sui generis di bawah naungan Prancis, namun perjuangan menuju dekolonisasi masih menghadapi hambatan besar. Referendum kemerdekaan yang diadakan pada tahun 2018, 2020, dan 2021 menunjukkan hasil mayoritas penduduk memilih untuk tetap bersama Prancis. Hal ini mendorong kelompok pro-kemerdekaan untuk menginternasionalisasikan isu dekolonisasi guna mendapatkan dukungan global dan meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Prancis. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana strategi internasionalisasi yang dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan dalam upaya mencapai dekolonisasi Kaledonia Baru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis eksplanatif untuk mengkaji bagaimana kelompok pro-kemerdekaan, khususnya Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), memanfaatkan forum internasional dan organisasi kawasan dalam perjuangannya. Teori dekolonisasi digunakan untuk menganalisis strategi yang diterapkan serta bagaimana aktor internasional merespons langkah-langkah yang diambil oleh kelompok pro-kemerdekaan. Sumber data yang digunakan meliputi dokumen akademik, wawancara dengan diplomat, serta laporan organisasi internasional yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi internasionalisasi yang dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan melibatkan berbagai aktor, termasuk negara-negara di kawasan Pasifik, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional. FLNKS berhasil membawa isu dekolonisasi Kaledonia Baru ke panggung internasional, mendapatkan dukungan dari Melanesian Spearhead Group (MSG), serta meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Prancis melalui forum multilateral. Namun, dinamika politik domestik serta keberlanjutan keterlibatan Prancis tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi jalannya proses dekolonisasi Kaledonia Baru.

Kata Kunci: Dekolonisasi, Internasionalisasi, Kaledonia Baru, Prancis, Referendum, *Self-Determination*.

ABSTRACT

INTERNATIONALIZATION STRATEGY IN THE DECOLONIZATION EFFORTS OF NEW CALEDONIA BY THE PRO-INDEPENDENCE MOVEMENT

By

UMMI NIDA AFIFA

New Caledonia remains under French sovereignty despite being granted sui generis status, yet its decolonization efforts continue to encounter substantial obstacles. The independence referenda held in 2018, 2020, and 2021 resulted in the majority of the population voting to remain part of France, prompting the pro-independence movement to internationalize the decolonization issue in an effort to garner global support and exert diplomatic pressure on France. This study examines the internationalization strategies employed by the pro-independence group, particularly the Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), in pursuit of New Caledonia's decolonization. Using a qualitative approach with an explanatory analysis method, this research investigates how FLNKS strategically engages international forums and regional organizations to advocate for self-determination while also analyzing the responses of international actors to these efforts. By employing decolonization theory as a framework, this study critically assesses the mechanisms through which the movement seeks legitimacy and external backing. The findings reveal that the internationalization strategy involves a broad spectrum of actors, including Pacific regional states, non-governmental organizations, and international institutions, with FLNKS successfully elevating the issue onto the global stage, securing support from the Melanesian Spearhead Group (MSG), and leveraging multilateral platforms to amplify diplomatic pressure on France. However, despite these efforts, the persistence of domestic political complexities and France's continued strategic presence in the territory remain key challenges that shape the trajectory of New Caledonia's decolonization process.

Keywords: Decolonization, France, Internationalization, New Caledonia, Referendum, Self-Determination.